

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diplomasi merupakan salah satu instrumen suatu negara dalam mencapai kepentingannya sebagai proses dari implementasi kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dalam hubungan internasional, praktek diplomasi dipengaruhi oleh globalisasi, revolusi teknologi informasi, meningkatnya peran media massa, dan meningkatnya partisipasi masyarakat (Djelantik, 2008). Melalui diplomasi, negara dapat membangun citra bangsanya dengan cara berkomunikasi antar negara seperti halnya melakukan praktik diplomasi dalam membentuk hubungan yang berkaitan dengan bilateral maupun multilateral, perjanjian internasional, hingga konferensi internasional.

Pada era perkembangan zaman saat ini, globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam proses berdiplomasi dan berkehidupan masyarakat berkebudayaan (Osman Bakar, 2008). Globalisasi merupakan fenomena proses masuknya ke ruang lingkup dunia¹ yang identik akan perubahan pada batasan-batasan dunia melalui teknologi yang merujuk pada interkoneksi sistem ekonomi dan sosial. Fenomena tersebut memengaruhi perspektif kemajuan agar dapat dikenal eksistensi suatu bangsa dan negara melalui budaya kerja, bahasa, hingga musik dan dunia hiburan. Pelbagai aktor hubungan internasional turut saling mempromosikan gaya hidup dan budaya masyarakatnya masing-masing melalui diplomasi seperti peran industri kreatif di Korea Selatan yang dibuktikan oleh banyaknya peminat yang menjadi peserta maupun penonton kegiatan kreatif secara global dan juga berdampak

¹ Makna Globalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/globalisasi> pada tanggal 03 Januari 2022, pukul 21:32.

pada peningkatan terhadap angka perekonomian negara ketika menjalin hubungan kerja sama internasional dengan negara yang memiliki potensi dalam memajukan negaranya. (Setiadi, 2015)

Setiap Negara memiliki strategi masing-masing untuk menyesuaikan dengan kepentingan nasional salah satunya dalam melaksanakan diplomasi publik, negara manapun dapat menggunakan kekuatan nasionalnya dengan *hard diplomacy* atau *soft diplomacy*. Kepentingan dari kekuatan nasional ini memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kebijakan luar negeri serta ketertiban regional dalam menghasilkan konsensus yang berfokus pada aspek perekonomian, geopolitik, dan tatanan secara global untuk membangun hubungan berintegrasi yang berskala nasional maupun internasional. Tanpa adanya kekuatan atau “*Power*” ini, Negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, Joseph S. Nye menyatakan bahwa *soft power* melibatkan partisipasi publik untuk memperoleh hasil yang diinginkan seperti dalam mencapai kemakmuran dan keterbukaan suatu negara (Nye, 2008). Namun perolehan tersebut dapat dicapai ketika Negara mendukung penyebaran akses informasi secara merata yakni salah satunya dengan memadai akses 5G untuk kalangan publik. Sedangkan dalam menghilangkan propaganda, *hard power* dapat dicapai dengan ancaman atau penggunaan senjata militer (Winkler & Nye, 2005).

Diplomasi terus berevolusi dengan aktor-aktor baru bermunculan secara beriringan dengan perkembangan teknologi. Diplomasi dan teknologi juga saling memenuhi kepentingannya masing-masing. Hal ini menjadi era baru dalam dunia diplomasi sebab peran dan aktivitas diplomasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai perwakilan bukan lagi melibatkan para petinggi negara.

Dalam penerapan diplomasi publik, inovasi dan kemajuan teknologi seperti telegraf, radio, komputer, perjalanan udara, dan komunikasi satelit sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi tindakan kebijakan yang disebabkan oleh waktu, jarak, dan informasi. Tujuannya untuk mempersempit kerangka waktu dalam pengambilan keputusan

maupun implementasi diplomatik. Dengan meningkatnya hubungan diplomatik didapatkan dengan penyebaran sejarah, tradisi, budaya, seni, nilai, kebijakan dan visi negara. Upaya Korea Selatan dalam mengimplementasikan diplomasi publik telah ditetapkan dalam *Public Diplomacy Act* (PDA) pada Agustus 2017. Dalam target kinerja yang ditetapkan dalam PDA tersebut, Korea Selatan mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional dan pengaruh global melalui komunikasi langsung dengan warga negara asing dengan visi “*Fascinating the world with Korea’s Charm*”. Dimana Kementerian Luar Negeri Republik Korea saat ini menjadi pos terdepan untuk proyek-proyek diplomasi publik khusus kawasan dalam kemitraannya dengan dengan 184 kedutaan asing salah satunya *Public Diplomacy Project of Korean Citizens* sebuah proyek di mana setiap warga negara diberikan kesempatan dan sumber daya untuk menjadi duta diplomasi publik. (ROK, 2022a)

Perkembangan teknologi berkembang secara pesat dalam memberikan ruang inovasi kepada dunia. Tom Fletcher mengatakan bahwa teknologi digital mengubah daya perubahan pada tingkat yang lebih cepat daripada waktu mana pun dalam sejarah (Fletcher, 2017). Kemunculan standar teknologi generasi kelima (5G)² pada tahun 2019 menjadi tantangan baru sekaligus kesempatan bagi suatu negara dalam mempertahankan hubungan kerja sama dengan negara lain karena teknologi ini dapat memberikan kecepatan data puncak *multi-Gbps*³ dengan kinerja yang lebih tinggi dan efisien dalam

² Qualcomm mendefinisikan 5G sebagai jaringan *mobile* generasi ke-5. Jaringan ini adalah standar nirkabel global baru setelah jaringan 1G, 2G, 3G, dan 4G. 5G memungkinkan jenis jaringan baru yang dirancang untuk menghubungkan hampir semua orang bersama dengan mesin, objek, dan perangkat. Dikutip dari Qualcomm, “*What’s in the future of 5G?*”, 2019, hal. 1-35.

³ Ibid., *multi-Gbps* membantu infrastruktur kabel masa depan dalam memperluas dan meningkatkan kemampuan jaringan *Internet of Things* (IoT) pada Wi-Fi.

menghubungkan pengguna baru dan industri baru melalui akses internet (Inc., 2019).

Dengan kemajuan teknologi ini, media membawa pengaruh yang besar pada perubahan perilaku sosial seperti hal akan terjadinya peningkatan pada aliansi hingga organisasi berbasis media di dunia maya, mobilitas internasional dalam modal dan tenaga kerja, serta maraknya kolaborasi antara individu, swasta, dan pemerintah. (Prasetyo & Trisyanti, 2018) Mantan Duta Besar Korea untuk Filipina Han Dong-man menuturkan bahwa “Era digital memudahkan para pemimpin dunia dalam menyebarkan kebijakan luar negeri yang sebelumnya hanya melalui media pers tradisional tetapi kini dapat diakses melalui jejaring media sosial seperti Instagram dan YouTube. Dan beberapa waktu ini, *metaverse virtual* hadir untuk menyikat tangga popularitas dunia dengan membawa pengaruh ke dalam dunia nyata sebagai misinya. Oleh karena itu, diplomasi publik diperlukan untuk mengikuti tren tersebut. Agar prakteknya efektif, perlu adanya perubahan dari pendekatan penyediaan informasi yang berorientasi pada pemerintah dan sepihak. Sebab diplomasi publik atau diplomasi publik digital yang tulus dan bermakna hanya akan mungkin terjadi ketika berbagai aktor dari pemerintah daerah, akademisi, LSM, pasar, pers, dan lainnya bisa bersatu padu.” (He-suk, 2022)

Hadirnya diplomasi digital sebagai bentuk dari kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi di era teknologi yang semakin pesat. Akhir-akhir ini banyak negara yang menggunakan akses jaringan internet untuk mempercepat informasi pemerintah kepada publik. Seperti penggunaan sosial media oleh kedutaan besar di berbagai negara, Kementerian Luar Negeri, hingga diplomat. Berkembangnya sosial media ini menjadi konsumsi kehidupan sehari-hari oleh mayoritas publik dan menjadikan diplomasi digital sebagai diplomasi baru yang berkembang. Sosial media berperan besar dalam menyediakan layanan digital agar aktor-aktor bilateral dapat bersaing secara aktif dan kreatif. Menurut data *Global World Index* tahun 2020, terdapat 4 (empat)

platform digital yang digunakan oleh pengguna sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter.

Dengan adanya ketersediaan akses Internet dengan kecepatan tinggi telah melahirkan situs-situs jejaring sosial sebagai dukungan dengan membuka pasar perekonomian baru. Dimana peningkatan terhadap kualitas status ekonomi masyarakat yang kini bersaing di sektor industri kreatif melalui sarana sosial media (Davies & Sigthorsson, 2013). Persaingan dilakukan dengan cara mengambil banyaknya pengguna sosial media untuk berinteraksi dengan konten-konten yang tersedia. Interaksi ini dilakukan melalui kekayaan intelektual yang dilandasi oleh nilai-nilai kreativitas dan kesenian masyarakat kreatif oleh industri hiburan. (Kaplan & Haenlein, 2010) Akan tetapi, perkembangan sosial media yang terjadi secara masif ini telah membentuk struktur budaya masyarakat yang baru sehubungan dengan interaksi sosial, masyarakat kini tidak bisa hidup tanpa sosial media. Hal tersebut mengakibatkan peraturan-peraturan hukum melebur ke dalam perkembangan teknologi yaitu dari luring ke daring⁴.

Meskipun hubungan Korea Selatan dan Indonesia telah berjalan sejak tahun 1966, sebagai wujud dari perkembangan teknologi, kedua negara ini mulai melakukan transformasi menuju digitalisasi dalam melaksanakan aktivitas diplomasinya dengan negara-negara lain. (Yoon, 2005) Pada tahun 2017, Presiden Moon menetapkan kebijakan *New Southern Policy* (NSP) sebagai kebijakan baru dan inisiatif diplomatik inti Republik Korea. Dengan menekankan 3P yakni *People*, *Prosperity*, dan *Peace* terbentuknya NSP ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian bersama tidak hanya di Semenanjung Korea tetapi juga di Asia Timur dan

⁴ Menurut KBBI, Luring adalah luar jaringan atau dikenal sebagai istilah *offline* atau kegiatan tatap muka secara langsung, sedangkan Daring adalah istilah dari dalam jaringan atau biasa disebut dengan *online* atau kegiatan yang dilakukan jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan komputer dan internet. Diakses dari <https://kbbi.web.id/globalisasi> , pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 15:21.

dunia. Juga berupaya untuk meningkatkan hubungan Korea dengan negara-negara anggota ASEAN dan India di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. NSP memperkuat hubungan antara Republik Korea dan ASEAN sebagai “mitra strategis”. Untuk membuktikan komitmennya, Indonesia menjadi negara pertama dan negara dengan pusat kebijakan Republik Korea yang dikunjungi oleh Presiden Moon dari sepuluh negara ASEAN pada tahun 2017. Selama kebijakan ini berlangsung, Korea membentuk NSP 2.0 di tahun 2019 sebagai bentuk perancangan yang lebih matang sesuai dengan prinsip inti ASEAN yakni salah satunya dengan menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. (FPCI, 2021)

Dengan dibukanya jalur mitra strategis di Kawasan Asia Timur dan ASEAN ini Korea Selatan diharapkan dapat membangkitkan budaya kerjanya melalui kebijakan *Creative Economy*. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), ekonomi kreatif merupakan sebuah strategi ekonomi baru yang menjadikan industri dan pasar baru. (UNCTAD, 2017) Meskipun perekonomian Korea Selatan masih dalam proses pemulihan, perkembangan teknologi yang sangat pesat di Korea Selatan menjadi acuan pada kemajuan dan penerapan teknologi di Indonesia yang kini masih dibatasi oleh regulasi pemerintah. Untuk meningkatkan hubungan persahabatannya, kedua belah negara perlu adanya batu loncatan yang dinyatakan dalam forum *ASEAN-Republic of Korea (RoK) CEO Summit di Busan Exhibition and Convention Center* (BEXCO) bahwa peluang dalam menjalin hubungan kerja sama internasional dalam bidang inovasi ada pada industri ekonomi kreatif. (Zuraya, 2019)

K-Wave sebagai salah satu bentuk dari *soft power* Korea Selatan. Dimana Indonesia menjadi target selanjutnya dalam mempromosikan K-Wave di negaranya. Sebab Indonesia Indonesia bertempat di wilayah Asia yang dipenuhi oleh sumber daya manusia dengan tingkat kreativitas interpersonal yang tinggi serta menjadi tempat yang strategis bagi investor asing sebagai jalur kerja sama internasionalnya dengan negara lain. Kebijakan ini menjadikan generasi millennials dan generasi Z

sebagai konsumen utama sekaligus aset unggulan untuk berperan dalam diplomasi publik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan dari segi penggunaan media sosial dan digitalisasi yang dilakukan oleh mereka cukup menggugah pemikiran dan batas-batas aktivitas menjadi transnasional. Hal tersebut didukung oleh Lee Jong-kook selaku mantan Duta Besar Korea untuk Libya yang mengatakan bahwa ia ingin menekankan peran kaum muda dalam menjadi konsumen dan penyebar “*knowledge public diplomacy*” atau diplomasi publik pengetahuan yang melampaui diplomasi publik budaya termasuk K-pop dan drama. Maka pemerintah, lembaga-lembaganya, dan lembaga lain seperti *Korea Foundation* yang menangani diplomasi publik harus bekerja lebih banyak untuk menarik potensi dari kaum muda. Diikuti oleh mantan Duta Besar Korea untuk Filipina, Han Dong-man melanjutkan bahwa Korea memiliki spektrum dukungan yang luas mulai dari *the Public Diplomacy Youth Camp under the Korea Foundation to the Digital Library of Korean Literature, the Digital Diplomacy Ambassador for Dokdo program, dan the Honorary Ambassador on Cultural Heritage under the Voluntary Agency Network of Korea*. (He-suk, 2022)

Menilik kutipan di awal penulisan, bahwa diplomasi digital menjadi instrumen diplomasi suatu negara dalam penyebaran informasi dengan melakukan agenda politik luar negeri dan hubungan antarnegara demi terciptanya perdamaian serta menjadi pengaruh untuk membentuk opini publik. Oleh karena itu, kita dapat menggali lebih dalam peran dari diplomasi digital bagi diplomasi suatu negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka penulis membentuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Diplomasi Digital Korea Selatan dalam Melakukan Kerja Sama dengan Indonesia?”

C. Kerangka Berpikir

Di dalam kerangka berpikir ini penulis menggunakan beberapa kerangka pemikiran yang akan membantu

menganalisis pokok permasalahan dengan menggunakan konsep diplomasi publik dan konsep diplomasi digital untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

1. Konsep Diplomasi Publik

Diplomasi publik adalah gambaran dari aspek hubungan internasional yang memanifestasikan dirinya di luar interaksi antar struktur negara (Gurgu & Cociuban, 2016). Joseph Nye menggambarkan diplomasi publik sebagai ekspresi politik dari *soft power*⁵ dengan artian konsep ini memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan partisipasi sukarela oleh sekutu, bukan oleh kendala. (Nye, 2008) Diplomasi publik menjadi komponen utama dari kebijakan luar negeri suatu negara juga sebagai topik dalam agenda organisasi internasional yang mempunyai fokus pada pemerintah atau organisasi internasional. Dalam sistem komunikasinya, konsep ini dapat dilakukan melalui individu maupun organisasi/lembaga tertentu seperti media berita, perusahaan, organisasi nonpemerintah (LSM), dan organisasi antar pemerintah dengan negara lain. Serta, untuk mencapai tujuan internasionalnya perlu membangun hubungan jangka panjang melalui pembentukan kebijakan pemerintah. (Gilboa, 2008) Hal ini membuktikan bahwa diplomasi publik merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam memobilisasi sumber daya manusia untuk berkomunikasi dengan publik ataupun negara lain.

Gilboa menyatakan bahwa diplomasi publik memiliki karakteristik yang luas seperti interaktivitas antara negara bagian dan aktor non-negara; pemanfaatan “*soft power*”, komunikasi dua arah, diplomasi publik strategis, *media framing*, manajemen

⁵ Menurut Joseph Nye, *Soft Power* merupakan kemampuan dalam meyakinkan aktor untuk mengambil suatu tindakan tanpa meliputi kekerasan, intervensi, dan sanksi. (Nye, 2008)

informasi, *public relations*, *nation branding*, presentasi diri, dan *e-image*; domestikasi kebijakan luar negeri; dan strategi dalam mengatasi masalah jangka pendek dan jangka panjang (Gilboa, 2008). Berdasarkan karakteristik-karakteristik bagian di atas menjelaskan bahwa diplomasi publik sebagai instrumen pemerintah dalam menciptakan memobilisasi sumber daya untuk berkomunikasi dengan menarik perhatian publik ataupun negara lain.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu dari pengaruh utama bagi revolusi diplomasi publik. Hal ini dapat mempengaruhi proses komunikasi dua arah dimana diplomasi publik mengalami pergeseran ke dalam sistem digital yang bersifat dialogis, kolaboratif, dan eksklusif. Dengan terjadinya kemajuan ini juga memberikan bentuk interaksi baru perilaku masyarakat terhadap hubungan masyarakat dan pemerintah secara lebih luas melalui popularitas sosial media dan internet serta membangun citra positif terhadap masyarakat internasional. (Bayuni, 2013)

Pada Pemerintahan Korea Selatan diplomasi publik didirikan sebagai poros dalam mengatur hubungan diplomatik dan meningkatkan citra nasional dengan mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional dan pengaruh global terhadap negara. KS menetapkan Undang-Undang Diplomasi Publik pada Agustus 2017 sebagai upaya dalam mempertahankan dana diplomasi publik dan memperkuat hubungan antar sekte Menteri. Saat ini, Kemenlu KS menjadi garda terdepan untuk proyek-proyek diplomasi publik khusus Kawasan dalam kemitraan dengan 184 kedutaan asing. Serta melaksanakan berbagai program diplomasi publik yakni salah satunya Proyek Diplomasi Publik Warga Korea (*Public Diplomacy Project of Korean Citizens*) yang merupakan sebuah proyek dimana kesempatan diberikan secara merata kepada setiap warga negara untuk menjadi duta diplomasi publik. (ROK, 2022a)

Korea Selatan menggunakan diplomasi publik sebagai *soft diplomacy* dengan membentuk *Public Diplomacy Act* (PDA) dan *Enforcement Decree of the Public Diplomacy Act* (EDPDA) pada tahun 2016. Dalam pasal 1 *Public Diplomacy Act* menjelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya PDA ini ialah untuk berkontribusi dalam meningkatkan citra dan prestise Republik Korea di masyarakat internasional dengan mendirikan landasan untuk memperkuat diplomasi publik dan untuk meningkatkan efisiensinya dengan menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan diplomasi publik. Dimana diplomasi publik merupakan kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Negara untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan warga negara asing terhadap Republik Korea secara langsung atau bekerja sama dengan pemerintah daerah atau sektor swasta melalui budaya, pengetahuan, kebijakan, dll. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagaimana tercantum pada pasal 3 yaitu (1) Diplomasi publik ditempuh dengan secara harmonis mencerminkan nilai-nilai universal umat manusia dan karakteristik hakiki Republik Korea; (2) Kebijakan diplomasi publik difokuskan pada peningkatan kerjasama yang berkelanjutan dan bersahabat untuk hubungan yang bersahabat dengan masyarakat internasional; dan (3) Tidak ada kegiatan diplomasi publik yang terkonsentrasi secara tidak proporsional di wilayah atau negara tertentu. Negara memiliki tugas penting sebagai aktor utama yang bertanggung jawab pada setiap pelaksanaan kebijakan, maka pada pasal 4 berbunyi Negara bertanggung jawab akan (1) Negara menetapkan dan mengupayakan strategi dan kebijakan yang komprehensif dan sistematis untuk memperkuat diplomasi publik dan meningkatkan efisiensinya; (2) Negara menyusun rencana dukungan administratif dan keuangan yang diperlukan untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Negara harus melakukan

upaya-upaya yang diperlukan seperti membangun platform kerjasama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk melakukan diplomasi publik secara efisien; dan (4) Negara melakukan upaya-upaya yang diperlukan seperti di bidang pendidikan dan hubungan masyarakat untuk membentuk konsensus sosial tentang pentingnya diplomasi publik dan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam diplomasi publik. (ROK, 2016b)

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Diplomasi Publik, MOFA ROK membentuk *Enforcement Decree of the Public Diplomacy Act* untuk mengatur hal-hal yang didelegasikan dari Undang-Undang Diplomasi Publik dan hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan hal-hal tersebut di atas. Menteri Luar Negeri dapat memberikan dukungan berikut kepada pemerintah daerah dan sektor swasta sesuai dengan Pasal 9 (1) dan (2) Undang-Undang mengenai Dukungan kepada Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta: (1) Dukungan untuk pembentukan platform kerjasama dengan pemerintah asing, lembaga swasta atau organisasi internasional; (2) Kerjasama dan dukungan untuk melakukan urusan dengan badan diplomatik asing atau misi diplomatik yang ditempatkan di Republik Korea; (3) Pemberian informasi dan dukungan administratif untuk pengembangan program diplomasi publik dengan negara asing; dan (4) Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Menteri Luar Negeri untuk merevitalisasi diplomasi publik. (ROK, 2016a)

Dalam pembahasan proses pengembangan diplomasi publik Korea, Lee Jong-kook selaku mantan Duta Besar Korea untuk Libya mengemukakan bahwa “Sejak Perang Dunia, Korea memiliki keunikan tersendiri di antara negara-negara di dunia dalam arti telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi dan demokrasi dimana orang Korea memiliki ciri-ciri nasional mereka sendiri. Sifat-sifat inilah yang bisa menjadi aset luar biasa dalam diplomasi publik Korea

dan berkontribusi untuk membangun merek nasional baru Korea dengan menunjukkan ketekunan serta sikap cinta damai mereka, meskipun mereka hidup di negara yang terpecah-pecah.” Lee melanjutkan bahwa berbagai konten budaya modern Korea secara konsisten dipromosikan bersama dengan budaya tradisionalnya yang dilandasi pada dinamika sejarah, kreativitas, dan universalitas serta kemampuan Korea yang dikenal di seluruh dunia dalam pengembangan TI dan infrastrukturnya. (He-suk, 2022)

Kim Dae-sik mantan Duta Besar Korea untuk Kazakhstan menambahkan jika diplomasi publik Korea saat ini sangat terfokus pada kebijakan yang berorientasi pada pemerintah pusat sementara kemampuan budaya daerah masing-masing tumbuh secara berkelanjutan. Sehingga muncul sebanyak 6T (enam) tantangan diplomasi publik yakni yang pertama dengan mengangkat *Theme*/tema “*Connecting Koreans with the World, Charming Korea*” dapat mendorong Kemenlu Korea dalam mewujudkannya. Kedua, dalam memperluas *Target*/sasaran yang tidak hanya mencakup warga negara asing dan publik, tetapi juga meluas ke orang asing yang saat ini tinggal di Korea dan termasuk 7,5 juta orang Korea di luar negeri. Lalu ketiga, rancangan yang ditetapkan untuk jangka *Time*/waktu lima tahun dialihkan dengan membuat pendekatan yang lebih rinci dalam 3 (tiga) jangka waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Keempat, dalam prakteknya yang cukup luas perlu adanya *Tailor-made*/penyesuaian secara seksama seperti pengadaptasian K-Food dan K-Pop pada negara-negara tertentu. Selanjutnya T yang kelima, sifat *Together*/bersama semenanjung Korea dalam berhadapan dengan berbagai aktor dan target dalam hal ini, pasukan AS di Korea sebagai target utama diplomasi publik kota Pyeongtaek. Dan terakhir, *Tool* sebagai T keenam yaitu alat yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam memerani diplomasi publik

seperti contoh Pyeongtaek menjadi tuan rumah Pekan Budaya Dunia yang bekerja sama dengan baik dengan Kedutaan Besar di Korea. (He-suk, 2022)

2. Konsep Diplomasi Digital

Seiring perkembangan internet dalam beberapa waktu terakhir, para diplomat⁶ dan jajaran pemimpin politik telah mempelajari penggunaan popularitas teknologi di era digital ini dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan internasional antarnegara dan memajukan kepentingannya masing-masing (Fletcher, 2017). Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa diplomasi digital mengubah interaksi dari monolog menjadi dialog. Hal ini disebabkan terdapat hubungan positif antara digitalisasi dan diplomasi publik.

Penggunaan teknologi internet dan sosial media kini menjadi jembatan bagi agen perubahan secara global. Teknologi baru menjadi strategi bagi para diplomat untuk menggunakan internet dan sosial media secara langsung dan menjadi bagian dari misi diplomatik dalam menjangkau warga negaranya tanpa adanya penghalang komunikasi antara mereka dengan publik (Verrekia, 2017). Beragam macam informasi dapat diunggah dan diakses dengan mudah melalui Instagram, YouTube, dan situs web. Maka dengan itu, kebijakan luar negeri dapat menguntungkan ketika terjadinya pertukaran informasi dua arah antara publik dan pemerintah melalui diplomasi digital menjadi instrumen pengantar pesan dari individu ke individu yang lainnya dengan memanfaatkan penggunaan teknologi digital.

Teknologi telah menjadi sarana dalam menyediakan fasilitas berupa akses komunikasi bagi

⁶ Diplomat merupakan individu yang ditunjuk oleh suatu negara atau lembaga antar pemerintah seperti PBB dan Uni Eropa untuk melakukan diplomasi dengan satu atau lebih negara atau organisasi internasional. Di Indonesia, diplomat bekerja di bawah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

masyarakat di dunia internasional. Hal tersebut diketahui pada data Indeks Peluang Digital ITU sejak tahun 2002 bahwa Korea Selatan menduduki peringkat pertama dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan konektivitas tinggi antara realitas *online* dan *offline* sehingga kehadiran layanan digital menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari budaya teknologi. Pada era modern ini sudah jarang sekali terdengar suatu negara maju maupun berkembang tanpa memiliki akses internet secara pribadi maupun publik. Dengan adanya sumber daya dan fasilitas publik diyakini dapat menjadi kekuatan paling besar terhadap potensi perkembangan komunikasi dengan negara lain. (Union, 2007)

Kita ketahui bersama bahwa Korea Selatan dan Indonesia memiliki gaya budaya dan sejarah yang berbeda. Sejak tahun 2017 menurut indeks *Soft Power* 30, Korea Selatan menempatkan diri di posisi kelima dalam sub-indeks Digital berkat infrastruktur digital kelas dunia (Jonathan, 2019). Guna meningkatkan kualitas negara Korea Selatan, diplomasi dan teknologi saling berkolaborasi dengan baik. Di antaranya strategi dalam mengekspansi pasar inovasi secara global dengan penggunaan teknologi sebagai sarana utamanya.

Pada kepemimpinan Presiden Moon Jae In, Korea Selatan menggunakan sosial media sebagai upaya untuk mengubah citra negara miskin selama mengalami krisis perekonomian pada tahun 1990an. KS berusaha membangun perekonomian dengan menggunakan platform sosial media sebagai sarana diplomasi dan kebijakan luar negeri KS. Penggunaan sosial media menjadi bagian peningkatan kualitas dalam mendapatkan dukungan publik untuk kebijakan luar negeri KS juga mempengaruhi citra positif kepada masyarakat internasional. Sebelumnya hanya berfokus pada diplomasi partisipatif sebagai sarana berkomunikasi dengan rakyat. Kini, dengan peluang masuknya 5G telekomunikasi memperluas jangkauan

jaringan internet di dalam ruangan dan jaringan publik/pribadi dengan memanfaatkan WiFi atau seluler kecepatan *Multi-Gigabyte* yang hampir tidak terbatas dan dapat diakses melalui ponsel cerdas, laptop, tablet, dll.

Seperti yang disebutkan di dalam laporan *Diplomatic White Paper 2019* yang dikeluarkan oleh MOFA Korea, pemerintah menjelaskan bahwa Korea dapat membangun instrumen baru dari sebuah konektivitas berjaring dalam membangun komunikasi, menciptakan konten kolaborasi, serta melaksanakan perdagangan global di abad ke-21. Bertujuan untuk memperlihatkan indahnya budaya Indonesia kepada dunia dengan menggunakan internet, sosial media, dan beberapa platform yang mengintegrasikan ke berbagai tempat di dunia. (ROK, 2018) Dengan intensitas perkembangan teknologi yang inovatif, industri kreatif di Korea Selatan menjadikan Indonesia sebagai mitra yang unggul akan sumber daya manusia di kawasan Asia sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap stabilitas insentif dalam hal perekonomian kedua belah negara (Jatmiko, 2021). Hal ini juga akan menciptakan hubungan kerja sama dengan aktor-aktor non negara seperti masyarakat sipil, Lembaga/organisasi, dan lain-lain untuk mencapai kepentingan dalam kebijakan luar negerinya.

Dengan melonjaknya pasar kreatif pada Revolusi Industri Keempat, kini peran industri kreatif terhadap fenomena globalisasi dan digitalisasi menjadi sangat penting pada hubungan internasional. Keadaan tersebut membuat dunia saling bersaing dalam memperluas batas-batas wilayahnya sehingga dapat membantu proses transformasi dalam interaksinya ke dalam ruang lingkup institusi atau industri yang terikat maupun yang tidak terikat oleh negara. Secara fundamental, hal ini berdampak pada perubahan cara berpikir, berhubungan, dan berkehidupan. Masa ini mengalihkan aktivitas manusia ke tidak hanya dalam

bidang teknologi saja melainkan ke dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kemajuan teknologi disiapkan secara matang sebagai upaya preventif akan hadirnya dampak negatif seperti maraknya *hoax* (informasi palsu) yang diakibatkan oleh mudahnya penyebaran informasi. Maka perlu adanya pengembangan sumber daya manusia oleh masyarakat kreatif agar dampak tersebut dapat dihindari. Masyarakat kreatif di sini ialah masyarakat yang memiliki peran penting dalam bidang seni dan kreativitas di kehidupannya sebab tidak dapat dipungkiri akan munculnya persaingan yang unggul dimana masing-masing negara perlu saling meningkatkan kesadaran dan kedewasaannya dalam berpikir agar masyarakat dapat bersaing secara kreatif sehingga strategi kebijakan nasional dapat diterapkan dengan baik.

Kondisi demikian menguntungkan hubungan Korea Selatan dengan Indonesia sehingga dapat saling mendorong untuk mengajak berinvestasi dan menarik perhatian para wisatawan untuk dapat saling berkunjung. Juga hadirnya K-Wave sebagai bukti konkret pada banyaknya pengguna akses internet dan sosial media di seluruh dunia.

D. Hipotesis

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan landasan teori di atas, maka dapat diambil hipotesis bahwa implementasi diplomasi digital Korea Selatan di Indonesia dilakukan dengan, sebagai berikut:

1. Menggunakan konten kreatif sebagai media promosi di sosial media. Hal ini menunjukkan bahwa negara, lembaga/agensi, dan individu dapat melakukan promosi dengan konten kreatif yang menarik melalui akun sosial medianya masing-masing;
2. Mengolaborasikan konten kreatif “*variety show*” Korea Selatan sebagai media acara program televisi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya peminat konten hiburan Korea Selatan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model eksplanatif analisis, yakni bersifat sekunder yaitu data diperoleh dari sumber secara tidak langsung lalu dijelaskan secara rinci variabel-variabel pada pokok dari permasalahan. Hasil yang telah diamati berdasarkan kerangka teori/pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini di mana tujuannya dan sasarannya memberikan hasil serta jawaban atas pertanyaan berupa apa, bagaimana, dan mengapa terhadap hubungan kerja sama bilateral Korea Selatan terhadap Indonesia melalui diplomasi digital pada masa kepemimpinan Moon Jae-in tahun 2017-2020.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data, penulis menggunakan data sekunder dengan menggunakan data-data yang diambil dari: portal resmi *Ministry of Foreign Affairs* (MOFA) Korea Selatan (<https://mofa.go.kr/>), jurnal artikel yang berjudul “*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*” oleh Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, dokumen resmi berjudul “*100 Policy Tasks: Five-year Plan of the Moon Jae-In Administration*” dan “*Diplomatic White Paper 2018-2019*” oleh MOFA Korea Selatan, media cetak berupa buku yang berjudul “*The Naked Diplomat*” oleh Toms Fletcher dan “*Digital Diplomacy: Theory and Practice*” oleh Corneliu Bjola dan Marcus Holmes yang berkaitan dengan tema penelitian tentang politik luar negeri Korea Selatan terhadap Indonesia pada tahun 2017-2020.

3. Analisis Data

Dengan demikian, setelah terkumpulnya berbagai macam data dan fakta yang diperlukan maka proses selanjutnya yaitu menganalisis data sesuai dengan fakta-fakta yang telah dipaparkan secara rinci untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan dari penelitian ini meliputi peran Korea Selatan di Indonesia dalam kurun waktu 2017 sampai 2020 dalam hubungan kerja sama politik luar negeri melalui implementasi diplomasi digital.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan gambaran tentang peristiwa globalisasi dan transformasi digital di dunia;
- b. Menjelaskan tentang pengaruh revolusi industri Korea Selatan di Indonesia;
- c. Mengimplementasikan diplomasi digital Korea Selatan di era kepemimpinan Moon Jae-in pada tahun 2017-2020.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dalam kepenulisan penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Secara Teoritis
 - a. Sebagai sarana kontribusi terhadap perkembangan ilmu sosial dan teknologi yang berlandaskan pada perkembangan penelitian kajian budaya kontemporer dan komunikasi massa;
 - b. Guna sebagai acuan bagi penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

- 2) Secara Praktis
Sebagai landasan dalam memahami fenomena kerja sama Korea Selatan dan Indonesia di bidang digital sub-sektor industri kreatif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian skripsi ini terdiri atas IV (empat) bab dan masing-masing bab memiliki beberapa permasalahan, sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai pembahasan utama dari penelitian skripsi yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II

Perkembangan Dunia di Era Globalisasi dan Transformasi Digital

Bab kedua ini akan menjelaskan secara umum tentang perkembangan globalisasi dan transformasi digital;

BAB III

Implementasi Diplomasi Digital Korea Selatan Melalui Kerja Sama Bilateral dengan Indonesia Pada Era Presiden Moon Jae-in

Bab ketiga ini akan memaparkan implementasi diplomasi digital yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam melakukan kerja sama dengan Indonesia;

BAB IV

Kesimpulan

Bab keempat ini adalah bab terakhir dari penulisan skripsi ini maka akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diteliti.